

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD RIFQI MASYHURI**

**NIM: G72215012**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Rifqi Masyhuri

NIM : G72215012

Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
134AKX054631628

Muhammad Rifqi Masyhuri  
NIM. G72215012

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Masyhuri NIM. G72215012  
ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 25 Mei 2022  
Pembimbing,



Dr. Noor Wahyudi, M. Kom

NIP. 198403232014031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Masyhuri NIM. G72215012 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa 07 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

### Majelis Munaqasah Skripsi

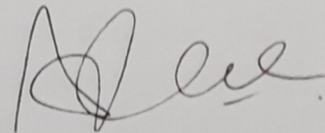
Penguji I



Noor Wahyudi., M.Kom

NIP. 198403232014031002

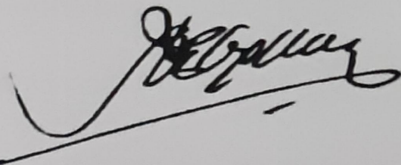
Penguji II



Ade Irma Suryani Lating, M.SA

NIP. 199110012019032020

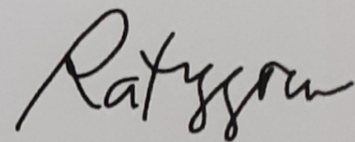
Penguji III



Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI

NIP. 201603311

Penguji IV



Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E, M.S.A, Ak, CA

NIP. 198905282019032014

Surabaya, 07 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitasi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Idris Arifin, S.Ag, S.S, M.E.I

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifqi Masyhuri  
NIM : G72215012  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi  
E-mail address : rifqimasyhuri23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisi *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Penulis

(Muhammad Rifqi Masyhuri)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**analisis *value for money* pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sidoarjo**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa kinerja Bappeda Sidoarjo pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan menggunakan metode analisa *Value For Money*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang pengumpulan datanya menggunakan tiga metode, yaitu : wawancara dengan pihak Bappeda Sidoarjo, Observasi dan dokumentasi. Data yang didapat selanjutnya diolah dan dianalisis kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Sidoarjo tahun 2017 dan 2018 sudah sangat baik. Melalui analisa *Value For Money* diketahui bahwa kinerja Bappeda sudah dinyatakan memenuhi kriteria baik dari segi ekonomi, efisien, dan efektif berdasarkan rumus yang digunakan peneliti dalam pengujian hasil LAKIP. Meskipun ada 2 (dua) program pada tahun 2017 yang dikategorikan efektif berimbang sebab hasil realisasi dan target sama dengan 100%.

Saran yang dapat peneliti berikan untuk Bappeda Sidoarjo agar lebih meningkatkan kinerja agar realisasi jauh lebih tinggi daripada capaian anggaran ataupun target kinerja dan jauh lebih maksimal.

Kata kunci : *Value For Money*, Bappeda Sidoarjo

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

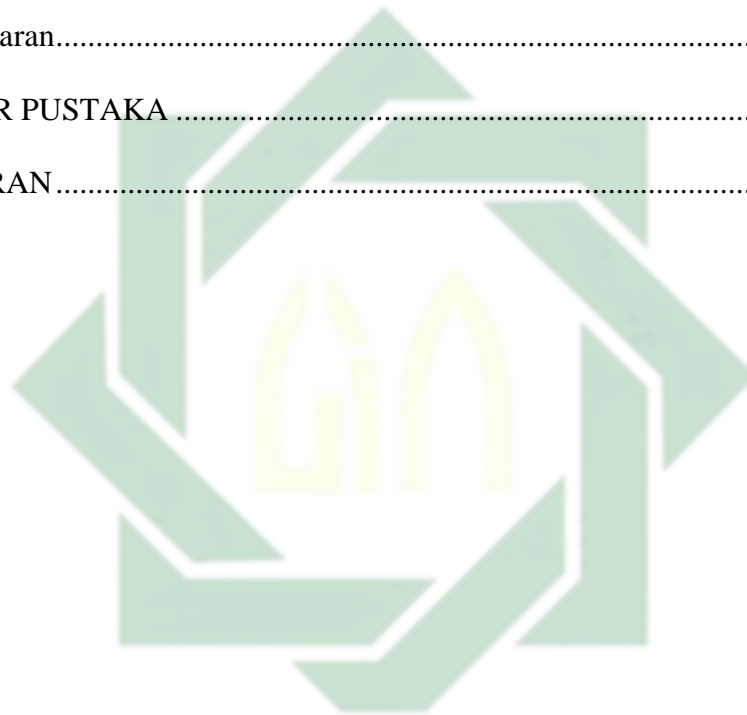
## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>Value for Money</i> .....	22
1.           Pengertian <i>Value for Money</i> .....	22

2. Manfaat <i>Value for Money</i> .....	23
3. Langkah-langkah Pengukuran <i>Value for Money</i> .....	24
<b>B. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</b>	
1. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
2. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	33
3. Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	34
4. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	34
5. Isi dan Manfa'at Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	36
6. Mekanisme Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	37
<b>BAB III DATA PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Obyek Umum Penelitian</b>	
1. Profil Badan Perencanaan Pemerintahan Daerah.....	38
2. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	38
3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39
<b>B. Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sidoarjo</b>	
1. Data LAKIP Tahun 2017 .....	50
2. Data LAKIP Tahun 2018 .....	63
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
<b>A. Analisis Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Analisis <i>Value for Money</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bappeda</b>	



Kabupaten Sidoarjo	
1. Ekonomi .....	78
2. Efisiensi.....	81
3. Efektivitas .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Review Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021 .....	54
Tabel 3.3	Rencana Kinerja Bappeda Sidoarjo Tahun 2017.....	56
Tabel 3.4	Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Sidoarjo 2017.....	58
Tabel 3.5	Pengukuran Indikator Tujuan Tahun 2017.....	60
Tabel 3.6	Interval Nilai Realisasi Kinerja .....	61
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	62
Tabel 3.8	Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Sidoarjo 2018.....	66
Tabel 3.9	Pengukuran Indikator Tujuan Tahun 2018.....	68
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2018 .....	68
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	72
Tabel 3.12	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2018 .....	73
Tabel 3.13	Laporan Pencapaian Kinerja Program Bappeda Sidoarjo Tahun 2017 dan 2018.....	74
Tabel 4.1	Laporan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 – 2018 .....	77
Tabel 4.2	Perhitungan Ekonomi.....	79
Tabel 4.3	Pengukuran Efisiensi Program Bappeda Sidoarjo 2017-2018 .	83
Tabel 4.4	Pengukuran Efektivitas Program Bappeda Sidoarjo 2017- 2018 .....	85

**DAFTAR GAMBAR**

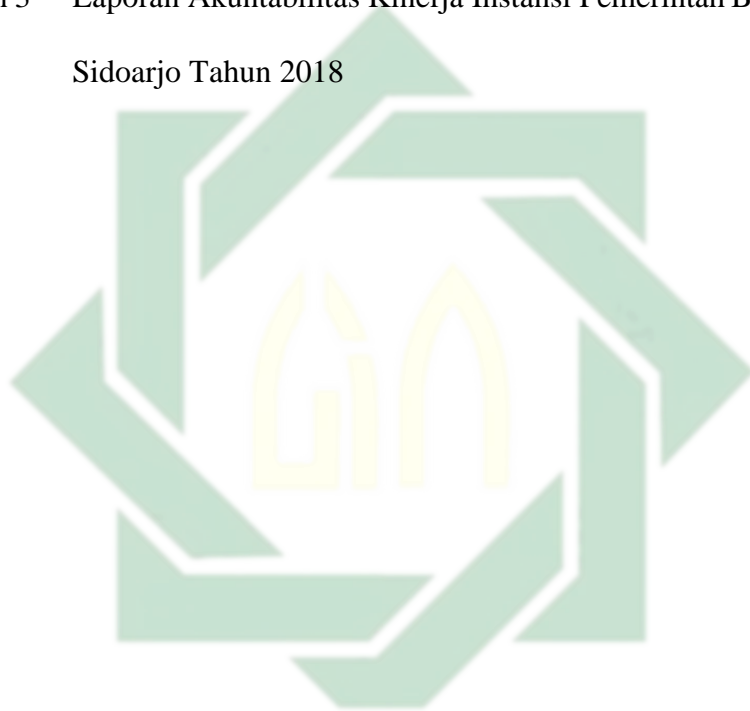
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bappeda Sidoarjo .....49



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Biodata Penulis
- Lampiran 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda  
Sidoarjo Tahun 2017
- Lampiran 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda  
Sidoarjo Tahun 2018



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik (*good governance*). Adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan. Untuk memenuhi standar tersebut, dibutuhkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi/pemerintah. Dan melalui sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme. Tindak lanjut dari produk hukum tersebut diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sehingga dalam pengupayaannya diperlukan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas tidak hanya kemampuan menunjukkan bagaimana sumber dana yang diperoleh dan telah dibelanjakan oleh suatu instansi pemerintah. Melainkan kemampuan memperhitungkan serta menyesuaikan perencanaan serta pembelanjaan sumber dana instansi pemerintah yang telah dianggarkan pada tahun anggaran terkait. Fungsi paling inti dari akuntabilitas publik adalah berkewajiban untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan tentang apa yang telah direncanakan, sedang direncanakan, dan akan dilaksanakan organisasi publik.

Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja dalam suatu organisasi publik, maka dibutuhkan konsep untuk mengukur sejauh mana kapabilitas terhadap perencanaan kinerja. Konsep yang sudah diimplementasikan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah hasil kinerja yang dapat dijadikan pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan adanya

pengukuran AKIP diharapkan instansi terkait mengerti, memahami, dan mampu mengimplementasikan Sistem Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pengukuran kinerja instansi pemerintah tersebut dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas sendiri merupakan konsep yang kompleks dan lebih sulit diwujudkan daripada memberantas korupsi. Karena dengan adanya sistem laporan tersebut, akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*). Yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi, efektifitas dan ekonomi suatu kinerja instansi pemerintah. Efisiensi berarti hubungan antara *input* dan *output* untuk mencapai tujuan tertentu, yang berarti tepat guna atau tidak dalam melakukan suatu kegiatan. Efektifitas adalah pencapaian suatu organisasi yang disesuaikan dengan visi dan misi serta rencana kerja dalam periode terkait. Sedangkan ekonomi adalah gabungan antara efisiensi

dan efektifitas dalam suatu kinerja yang dalam hal ini akan diuji melalui konsep *Value for Money* (VFM).

*Value for Money* (VFM) dapat tercapai apabila suatu organisasi telah menggunakan input paling rendah untuk mencapai output yang maksimal sebagai bentuk pencapaian tujuan organisasi. Dan selain *Value for Money* (VFM), dikenal istilah akuntabilitas. Yang merupakan *output* penilaian kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang wajib dilaporkan. Kinerja pemerintah ini dibuat atau direncanakan sesuai dengan Restra (Rencana Strategis) dengan jangka waktu 5 tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan kebijakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LAKIP merupakan wujud pencapaian visi dan misi sebagaimana dijabarkan dalam rincian tugas atau sasaran strategis, yang mengacu pada Perencanaan Strategik (Restra), Rencana Kerja Pemerintah (Renja/RKP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKTm). Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil laporan yang diharapkan adalah kinerja tiap satuan sektor. Istilah kinerja sering digunakan



untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja tersebut bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan/program-program yang ditetapkan atau direncanakan. Kinerja-kinerja tersebut akan dilaporkan secara berkala guna mengetahui tingkat efektifitas serta efisiensi dalam melakukan kinerja di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan maksud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sejalan dengan itu, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah juga meminta kepada OPD yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan segera melakukan

evaluasi, khususnya dalam penyerapan anggaran, realisasi *output* dan akuntabilitas kinerja lebih diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menguji tingkat akuntabilitas kinerja yang ada di instansi pemerintah kabupaten Sidoarjo, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Adapun instansi pemerintah di Sidoarjo yang menarik perhatian peneliti adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo. Hal ini dikarenakan Bappeda merupakan instansi yang berpengaruh terhadap pembangunan di daerah termasuk dalam dunia pendidikan. Selain itu, instansi ini harus membuat dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi dalam bentuk LAKIP yang dibuat setiap tahun anggaran.

Karena kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja. Tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersamaan. Maka dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep *Value for Money* (VFM) untuk menguji kinerja pemerintah melalui LAKIP yang dibuat. *Value for Money* (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, ada perbedaan hasil akhir yang disimpulkan. Menurut Putu Dewi dan I Gusti Ketut (2017), Agus dan Ni Gusti (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan memenuhi kriteria ekonomi, efisien, dan efektivitas

yang baik. Namun, menurut Afsita Meri dan Siti Khairani (2017) menunjukkan kinerja keuangan tidak memenuhi kriteria ekonomi, efisien, dan efektif.

Dari penelitian tersebut di atas, penulis pun tertarik untuk melakukan analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) instansi pemerintah Sidoarjo tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan menggunakan metode *Value for Money*. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dan batasan masalah merupakan gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian, berikut identifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

- a. Pentingnya dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik (*good governance*).
- b. Perspektif Ekonomi berdasarkan LAKIP Sidoarjo
- c. Evaluasi efisiensi kinerja berdasarkan LAKIP Sidoarjo
- d. Pengaruh LAKIP Sidoarjo terhadap efektifitas kinerja pertanggungjawaban pemerintah.
- e. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar

pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

- f. Sektor publik seringkali dinilai sebagai sarang pemborosan, penyerapan anggaran yang melebihi target anggaran yang tidak sesuai, serta realisasi anggaran yang melebihi target anggaran yang sudah dianggarkan.
- g. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama.
- h. Metode *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Dengan beberapa identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti hanya meneliti menggunakan metode *Value for Money* dengan tiga elemen yakni ekonomi, efisien dan efektif pada LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- b. LAKIP Bappeda yang digunakan adalah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat efektif?
2. Bagaimana LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat efisien?
3. Bagaimana LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat ekonomi?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskriptif ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Munculnya penelitian ini tak lepas dengan penelitian-penelitian terdahulu baik berupa jurnal maupun skripsi seputar “Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Di bawah ini merupakan paparan jurnal maupun skripsi terdahulu yang serupa.

1. Penelitian oleh Theophilia Afsita Meri dan Siti Khairani (2017) yang berjudul: “Analisis *Value For Money* dan Akuntabilitas Publik Pada PDAM Tirta Musi Palembang”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran perusahaan pada tahun 2010-2012, maka *Value for money* pada PDAM Tirta Musi

Palembang tidak berjalan dengan baik karena tidak memenuhi ketiga elemen tersebut yakni tidak ekonomis, efisien dan efektif.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang LAKIP dan merujuk data LAKIP. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti anggaran dan realisasi anggaran pada PDAM Tirta Musi Palembang.

2. Penelitian oleh Titik Widyastuti (2018) yang berjudul: “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali tahun 2015 telah disajikan sesuai Permenpan-rb. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada konsep penelitian yaitu *Value for Money* pada LAKIP.

3. Penelitian oleh Laurensia Koen Indriaswari (2017) yang berjudul: “Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Banyumas dari seluruh kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, kurang efisien dan kurang efektif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang LAKIP dengan metode *Value for Money*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada pengukuran kinerja.

4. Penelitian oleh Fajar Bayu Putri Perwirasari (2016) yang berjudul: “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa variabel pemahaman prinsip *good governance*, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif pada AKIP. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan faktor-faktor apa saja mempengaruhi kinerja instansi pemerintah.
5. Penelitian oleh Lalu Danny Segara (2017) yang berjudul: “Analisis Determinan *Good Government Governance* serta Implikasi Pada Kualitas LAKIP”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah

metode analisis statistic deskriptif. Hasil penelitiannya adalah Moralitas berpengaruh positif terhadap implementasi GGG, karena hal ini disebabkan Moral Kepemimpinan sedangkan Keandalan juga berpengaruh positif terhadap implementasi GGG, karena hal ini disebabkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada konsep penelitian yaitu *Value for Money* pada LAKIP.

6. Penelitian oleh Meyliana, Lidya Agustina dan Chandra Setiawan (2017) yang berjudul: “Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Populasi dan Sampel. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan sistem penilaian kinerja berorientasi intensif dan eksplorasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja PNS SKPD di Kota Bandung. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada konsep penelitian yaitu *Value for Money* pada LAKIP.

#### **E. Tujuan Penelitian**



Dengan adanya rumusan masalah mengenai penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat ekonomi.
2. Untuk mengetahui LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat efisien.
3. Untuk mengetahui LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat efektif.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut ini uraian tentang kegunaan teoritis dan praktisnya:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya tentang analisa Value for Money yang mempunyai tiga elemen penting yakni segi ekonomi, efisien dan efektif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
  - b. Memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain seputar bidang yang diteliti.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengukuran *Value for Money*

pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

- b. Bagi Pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan capaian pada rasio ekonomi, efisien dan efektif pada LAKIP Bappeda.
- c. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan.
- d. Bagi Universitas: menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo“ untuk memahami mengenai istilah-istilah atau kata dalam judul tersebut maka ada beberapa kata kunci yang harus dipahami:

1. *Value for Money*

Merupakan indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Yang juga merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas.

2. LAKIP

Merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

3. BAPPEDA

Merupakan singkatan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten atau kota dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan Walikota. Selain itu, badan ini merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian dengan berpusat pada masalah yang terjadi saat penelitian berlangsung.

### 2. Data penelitian

Adapun data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Profil Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- b. Wawancara dengan Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Tim Penyusun LAKIP Bappeda.
- c. Mencari informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda
- d. Inspektorat BPKP

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam hal ini peneliti memilih informan Kepala Bappeda dan beberapa staffnya untuk mendapatkan informasi LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2018.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan sebagai data pendukung untuk penguat dari data primer. Selain itu peneliti juga memerlukan buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa tugas pokok dan fungsi Bappeda.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang

diwawancarai. Wawancara yang peneliti lakukan dengan

Informan meliputi:

- 1) Kepala Bappeda
- 2) Sekretaris Bappeda, dan
- 3) Penyusun LAKIP Bappeda.

b. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

Dokumentasi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti seperti dokumen surat-surat. Dari data-data yang diperoleh, diolah dan dikombinasikan sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam memperjelaskan penyelesaian masalah.

5. Teknik pengolahan data

Data yang terkumpul kemudian diolah sesuai dengan penelitian.

Data diolah agar data tersebut dapat dipahami. Berikut teknik pengolahan data yang diperlukan:

- a. *Editing* yaitu memeriksa data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi dan memilah dalam beberapa segi yaitu keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain serta relevansi dengan masalah yang dibahas.

- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran dari penelitian tentang *Value for Money* pada LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- c. *Analyzing* yaitu langkah terakhir dalam pengelolaan data yang telah ada untuk ditelaah kembali lalu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah dengan membuat deskripsi penggunaan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur yang berkaitan dengan penggunaan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2014 yang bertujuan agar mendapatkan arah dan gambaran yang jelas dalam hal penulisan. Berikut ini sistematika pembahasan:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis: Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu tentang teori yang berhubungan dengan *Value for Money* dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

BAB III Data Penelitian: Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi penelitian, dan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Meliputi informasi tentang bagaimana struktur organisasi dan Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan.

BAB IV Analisis Data: Pada bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi peneliti untuk menjawab bagaimana Analisis *Value for*



*Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017-2018 agar pengolahan data dapat diolah secara efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

BAB V Penutup: Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban permasalahan bagaimana Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan saran berisikan tentang implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. *Value for Money*

##### 1. Pengertian *Value for Money*

*Value for Money* merupakan konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep ini diharapkan mampu memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2002), *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Sedangkan menurut Ardila (2015), *Value for Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Dari beberapa definisi di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa *Value for Money* merupakan konsep analisis yang didasarkan pada tiga elemen pokok utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

## 2. Manfaat *Value for Money*

*Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Masing-masing elemen mempunyai manfaat berbeda dan saling melengkapi. Dalam hal ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Dan efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik.

*Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good gayer-liance*. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Ketiga elemen tersebut bermanfaat untuk menekan penyalahgunaan dalam melaksanakan program-program yang dicanangkan suatu organisasi ataupun instansi. Selain terfokus pada tiga

elemen dasar tersebut di atas, manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja in-efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- d. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

### 3. Langkah-langkah Pengukuran *Value for Money*

Setelah mengetahui manfaat konsep *value for money*, tentunya terdapat langkah-langkah dalam pengukuran konsep tersebut agar bisa dipertanggungjawabkan di depan atasan atau masyarakat dengan baik. Berikut langkah-langkah untuk mengukur melalui konsep *Value for Money*, antara lain:

#### a. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

- Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?

- Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?.

Selain itu, pengukuran ekonomi membutuhkan data-data tentang anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomi suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Untuk mengukur tingkat ekonomi suatu anggaran dibutuhkan rumus matematis di bawah ini:

$$Ekonomi = \frac{Input}{Nilai\ Input} \times 100\%^{32}$$

Keterangan :

Input : Realisasi anggaran daerah yang digunakan oleh Bappeda Sidoarjo tahun 2017-2018

Nilai Input : Anggaran Daerah Bappeda Sidoarjo tahun 2017 – 2018

#### b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Melalui pengukuran efisiensi maka akan diketahui bahwa kinerja tersebut tepat guna atau tidak.

Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

- Meningkatkan *output* pada tingkat input yang sama.
- Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*.
- Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama.
- Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi, yaitu:

$$Efisiensi = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Prosentase capaian anggaran Bappeda Sidoarjo tahun 2017-2018

Input : Prosentase capaian kinerja Bappeda Sidoarjo tahun 2017 - 2018

#### c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Melainkan fokus pada pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut formula untuk mengukur efektivitas, yaitu:

$$Efektivitas = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Prosentase realisasi kinerja Bappeda Sidoarjo  
tahun 2017 – 2018

Output : Prosentase target kinerja Bappeda Sidoarjo tahun  
2017 - 2018

d. Pengukuran *Outcome*

*Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas *output* terhadap dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki 2 peran:

- Peran retrospektif adalah penilaian kinerja di masa lalu, yaitu peran yang menentukan apakah manfaat yang diharapkan (*expected benefit*) dari suatu program publik telah terwujud.
- Peran prospektif adalah perencanaan kinerja di masa yang akan datang, yaitu peran yang memberikan bukti terhadap praktik pengelolaan yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik.

Dari kedua peran tersebut di atas, pengukuran *outcome* digunakan untuk evaluasi dan pengarahan keputusan alokasi sumber daya publik. Dengan harapan akan berdampak positif terhadap *output* organisasi atau instansi pemerintah.

e. Estimasi Indikator Kinerja

Setiap unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indikator kinerja. Adanya estimasi dimaksudkan agar kinerja berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu.

Estimasi indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kinerja tahun lalu

Kinerja tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Karena merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Disamping itu terdapat jeda waktu (*time lag*) antara aktivitas yang telah dilakukan dengan dampak yang akan timbul dari aktivitas tersebut.

Dari dampak yang ditimbulkan pada tahun sebelumnya, bisa diidentifikasi hal-hal yang menghambat dan hal-hal yang mendukung kinerja. Hal tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan kinerja di masa mendatang ataupun penyemangat untuk meningkatkan kinerja secara maksimal.

b. *Expert Judgement*



Karena kinerja tahun lalu sangat berpengaruh pada kinerja berikutnya, maka *expert judgement* digunakan sebagai salah satu estimasi kinerja. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Selain itu, tidak terlalu mahal dari segi biaya. Tetapi teknik ini mempunyai kelemahan yaitu sangat tergantung pada pandangan subyektif para pengambil keputusan. Dampak dari pencapaian kinerja tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa unit tersebut mengalami peningkatan kinerja.

c. *Trend*

*Trend* digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar kinerja bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai target yang ditentukan.

## **B. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

### **1. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sebelum membahas lebih jauh tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dipahami lebih dulu tentang akuntabilitas dan kinerja. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja dan tindakan organisasi atau instansi pemerintah kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian rencana kerja sesuai dengan visi dan misi organisasi atau instansi pemerintah.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan ini dibuat untuk menguji atau mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja dalam tiap sektor di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Selain sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*, laporan ini merupakan bentuk pelaporan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Berikut penjelasan tentang komponen organisasi yang merupakan satu kesatuan dalam LAKIP:

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan berkesinambungan.

Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan arah jalannya dan tindakan suatu organisasi untuk membuat kemajuan yang diperlukan, tetapi juga bagaimana memprediksi keberhasilan target yang sudah ditentukan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan

program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dengan perencanaan ini diharapkan kinerja akan terlaksana dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang sesuai.

b. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan sebuah proses terus-menerus yang mencerminkan praktik manajemen normal yang baik dalam hal penentuan arah, monitoring, pengukuran kinerja dan tindakan yang sesuai. Selain itu, perencanaan kinerja juga merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*). Program yang dimaksud dapat berupa aktivitas, proyek, fungsi, atau kebijakan yang telah teridentifikasi tujuan atau sarannya.

Penggunaan alat bantu yang tepat dalam pengukuran kinerja akan dapat memudahkan dalam memahami, mengelola, dan meningkatkan hasil yang dicapai organisasi. Pengukuran kinerja yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk mengetahui :

- a. Seberapa baik organisasi berjalan
  - b. Apakah organisasi telah mencapai tujuan
  - c. Apakah para pengguna layanan merasa puas
  - d. Apakah proses yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan
  - e. Apakah ada perbaikan dalam sistem pelayanan (kinerja pelayanan) dan dimana.
- d. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan proses terakhir dalam kinerja. Proses ini meliputi pembuatan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan setiap target yang sudah direncanakan.

Pelaporan ini disesuaikan dengan indikator pelaporan yang ditentukan. Dalam hal ini, setiap organisasi atau instansi harus melaporkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **2. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Setiap laporan kinerja yang dibuat organisasi atau instansi pemerintah mempunyai fungsi tertentu. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan kinerja tersebut juga berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja agar lebih maksimal. Terdapat beberapa fungsi laporan kinerja, diantaranya:

1. Media hubungan kerja organisasi,
2. Media akuntabilitas
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja
4. LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan

Selain manfaat tersebut di atas, ada manfaat lain dari disusunnya laporan kinerja bagi instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### 3. Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam membuat laporan kinerja harus ditetapkan tujuannya. Begitu pula dengan pembuatan laporan kinerja dalam sebuah instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana laporan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan atau belum. Adapun tujuan pembuatan LAKIP, antara lain:

- a. Mengenalinya kendala dan permasalahan yang dihadapi
- b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output
- c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap rencana
- d. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan *stakeholders*
- e. Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

### 4. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penyusunan laporan tentunya mempunyai pedoman yang memuat prinsip-prinsip dalam menyusun laporan. Hal ini sebagai gambaran atau batasan agar pelaporan lebih terarah dan akuntabel.

Pedoman tersebut diatur dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan 31 Desember 2010. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tersebut masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut.

Penyusunan LAKIP harus mengikuti beberapa prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Prinsip lingkup penanggungjawab.

Prinsip ini melaporkan hal-hal yang proporsional dengan lingkup kewenangan atau kebijakan.

2. Prinsip prioritas.

Prinsip ini melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Prinsip manfaat.

Laporan ini harus mempunyai manfaat untuk banyak kalangan. Disamping itu, laporan ini harus mempunyai manfaat yang lebih besar dari biaya penyusunannya.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, diharapkan pelaporan atau LAKIP dapat menjelaskan semua perencanaan, proses pelaksanaan serta hasil program perusahaan atau instansi pemerintah. Sekaligus menjadi bahan pembelajaran untuk kinerja selanjutnya.

## 5. Isi dan Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya. Berikut dijabarkan yang harus tertulis dalam sebuah laporan, diantaranya:

1. Perumusan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah.
2. Perumusan indikator kinerja yang terdiri dari masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*)
3. Ada tidaknya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintahan yang bersangkutan
4. Ada sistem yang mampu menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan
5. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
6. Jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Selain itu, terdapat banyak manfaat disusunnya laporan ini, diantaranya sebagai peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas kinerja



organisasi atau instansi pemerintah. Selain itu, sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta sebagai sumber informasi untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan sebuah program kerja.

#### **6. Mekanisme Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Setiap pembuatan laporan pertanggungjawaban akan selalu disertakan tata cara atau mekanisme dalam penyampaian. Begitu pula dalam penyusunan LAKIP baik organisasi maupun instansi pemerintah. Mekanismenya adalah bahwa setiap pemimpin Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyusun perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sidoarjo terletak di kawasan strategis di kota Sidoarjo yakni di Jalan Sultan Agung Nomor 13, Gajah Timur, Magersari kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo.

##### **2. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

###### **Visi**

“Terwujudnya perencanaan yang sinergis dan berkelanjutan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang dilandasi sikap profesionalisme”.

###### **Misi**

“Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui : analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

##### **3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi :

1. **Unsur Pimpinan** : Kepala Badan

Yang mempunyai tugas tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai

fungsi :

- a. Perencanaan program bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## 2. Unsur Staf :

Sekretariat melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dan fungsinya sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - b. Melaksanakan pengelolaan barang;
  - c. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;

- d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
2. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program, meliputi :
  - a. Fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan;
  - b. Menyusun dokumen Renstra badan;
  - c. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Menyusun laporan badan, meliputi :
  - a. Menyusun dokumen evaluasi dan monitoring dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Menyusun LAKIP.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan administrasi keuangan;
2. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. **Unsur Pelaksana**, terdiri dari:

1. Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana

Wilayah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan wilayah dan pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah dan pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah dan pertanahan;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan permukiman dan lingkungan hidup;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan permukiman dan lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika.

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan prasarana wilayah, komunikasi dan informatika;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan prasarana wilayah, komunikasi dan informatika;
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan prasarana wilayah, komunikasi dan informatika;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata;
    - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, sumber daya alam dan ekonomi pariwisata;
    - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pertanian, sumber daya alam dan ekonomi pariwisata;
    - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pertanian, sumber daya alam dan ekonomi pariwisata;
    - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
  2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan perencanaan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan perencanaan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bidang Penanaman Modal dan Alternatif Pembiayaan.

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal dan alternatif pembiayaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan penanaman modal dan alternatif pembiayaan;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan penanaman modal dan alternatif pembiayaan;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari:



1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kesejahteraan rakyat;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kesejahteraan rakyat;
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan kesejahteraan rakyat;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pemberdayaan masyarakat;

- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data, terdiri dari:

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta inovasi daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta inovasi daerah;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta inovasi daerah;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi daerah;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi daerah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### 3. Sub Bidang Data.

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan analisa data serta penyajian sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta penyajian sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta penyajian sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;

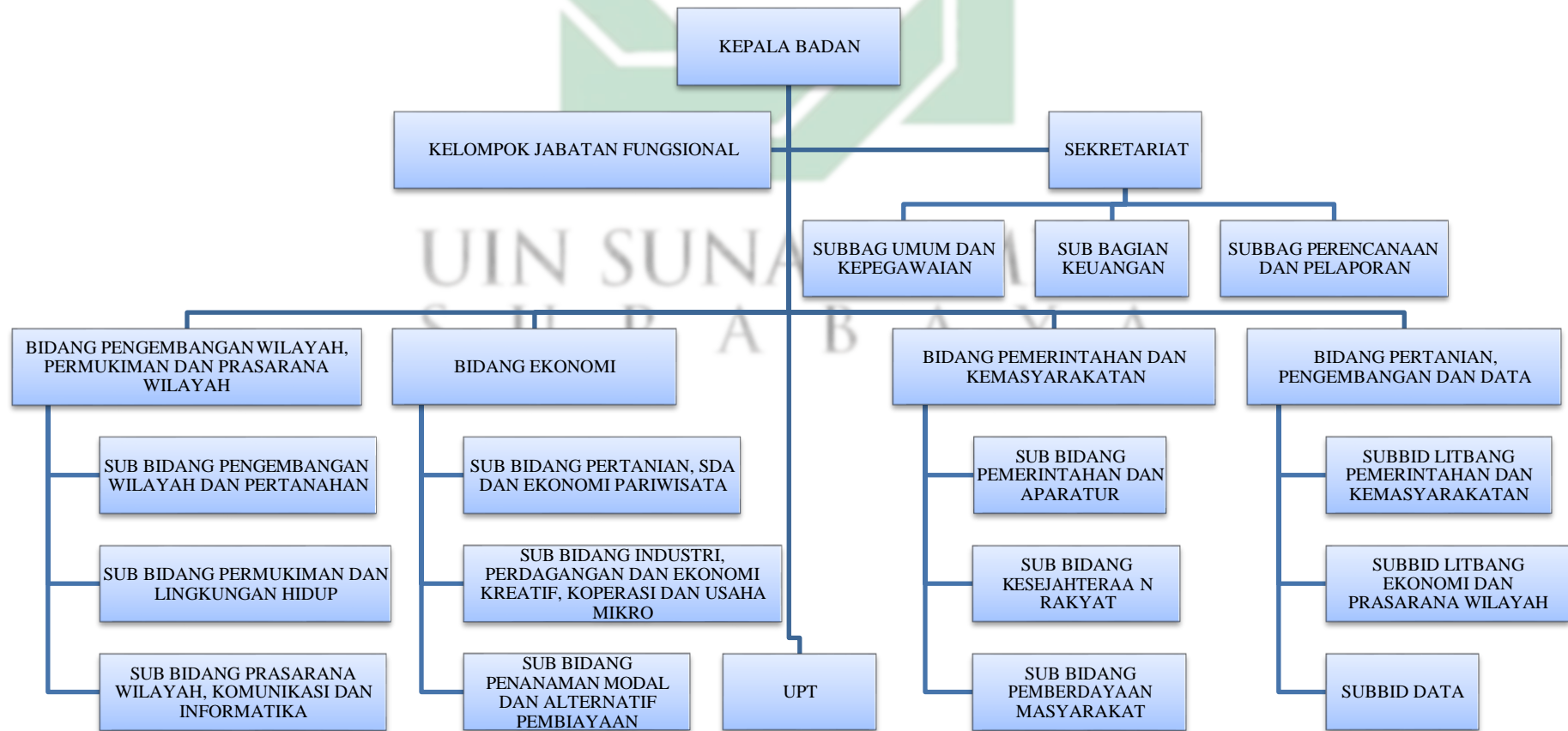
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Unit Pelaksana Teknis;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Adapun Gambaran Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 juncto Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Sidoarjo



## **B. Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Sidoarjo**

Dalam sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus diatur sedemikian rupa, baik dalam perencanaan maupun laporan. Hal ini pun berlaku pada instansi pemerintah, baik tingkat kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Termasuk dalam hal ini adalah, Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Bappeda juga harus membuat perencanaan anggaran dan laporan keuangan berupa laporan kinerja atau yang biasa disebut LAKIP.

Salah staff Bappeda mengungkapkan bahwa setiap awal ataupun akhir tahun terdapat pembahasan tentang pengelolaan anggaran dalam bentuk perencanaan/anggaran.

*“Setiap program yang direncanakan dan disetujui harus melampirkan perencanaan anggaran agar program tersebut segera terrealisasi. Selain itu, setelah tutup tahun, harus ada laporan kepada atasan/kepala bagian untuk dijadikan satu dalam bentuk LAKIP.”*

Berdasarkan data LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan tahun 2018, berikut kami paparkan data yang terdapat pada LAKIP tersebut, yaitu :

#### **1. Data LAKIP Tahun 2017**

##### **a. Perencanaan Strategis**

Dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, maka

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskanlah dalam tujuan, sasaran serta indikator sasaran dan telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bappeda diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan.

Dalam kedudukannya, BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo harus berperan sebagai lembaga teknis daerah yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Sidoarjo. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, pada urusan perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Sidoarjo harus fokus pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif.

Maka dari itu, perlu disusun suatu rancangan atau rencana strategis guna memudahkan perangkat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Bupati Sidoarjo. Perencanaan strategis ini akan bersinergi dengan rencana jangka pendek, menengah

maupun jangka panjang yang sudah disusun lebih awal. Karena pada dasarnya perencanaan strategis adalah sebagai bentuk metode atau cara mudah untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut. Berikut hal yang akan mendukung pencapaian rencana strategis tersebut :

**a. Matriks Rencana**

Strategis Sejalan dengan dinamika perencanaan pembangunan nasional saat ini. Dimana telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) hanya memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Sidoarjo yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka keselarasan dan keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan Rencana Strategis mengacu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Dalam rangka keselarasan dan sinergitas dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maka



dilampirkan Matriks Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2016-2021.

**b. Indikator Kinerja Utama**

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) 2016-2021**

1. SKPD : BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO
2. Tujuan :
  - a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
  - b. Mengoptimalkan peran litbang dan data dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
3. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Tabel 3.2**  
**Review Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 2016-2021**

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase PD yang menyusun dokumen Renja tahunan dengan kualitas baik	$\frac{\sum \text{dokumen Renja SKPD yang berkualitas baik}}{\sum \text{Renja seluruh SKPD}} \times 100$ <p>Defisini Operasional Renja yang berkualitas menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renja disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu</li> <li>2. Berisikan Program dan kegiatan yang memuat Tupoksi SKPD</li> <li>3. Memuat Indikator kinerja yang terukur ,lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan</li> <li>4. Terdapat keselarasan dengan Renstra dan RPJMD</li> <li>5. Terdapat keselarasan antara Renja dan RKPd.</li> </ol>	RPJMD RKPd Renstra Renja	Bidang Penmas, Bidang Bangkimpraswil Bidang Ekonomi dan Sekretariat
	2. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPd	$\frac{\sum \text{usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPd}}{\sum \text{Usulan hasil Musrenbang Kecamatan Keseluruhan}} \times 100$ <p>Definisi operasional adalah : Usulan Kecamatan adalah hasil priotisasi usulan Desa/Kelurahan yang dibahas dalam Forum Musrenbang Kecamatan dan diusulkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Sidoarjo melalui SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi SKPD</p>	BA Musrenbang Kecamatan dan Renja SKPD, Aplikasi Musrenbang Online RKPd	Sekretariat
	3. Persentase kegiatan pembangunan sektoral dalam RKPd terhadap arahan pemanfaatan ruang (RTRW)	$\frac{\sum \text{kegiatan pembangunan sektoral dalam RKPd}}{\sum \text{Arahan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RTRW dan RDTRK)}} \times 100$ <p>Definisi operasional adalah : indikasi kegiatan pembangunan sektoral/kewilayahan yang terdapat dalam dokumen RKPd yang sesuai dengan arahan indikasi kegiatan dalam dokumen tata ruang (RDTRK/ARTRW)</p>	Renja PD, RKPd, RTRW	Bidang BangKimpraswil
	4. Persentase Program Pembangunan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75 %	$\frac{\sum \text{Program di RPJMD yang capaian targetnya min 75 \%}}{\sum \text{seluruh Program RPJMD yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan}} \times 100$ <p>Definisi Operasional : Program di RPJMD yang pencapaian kinerja</p>	RPJMD, laporan Monev	Sekretariat

		minimal 75 %, dimana pencapaian kurang dari 75 % menunjukkan ketidakberhasilan SKPD dalam melaksanakan program di RPJMD.		
	5. Persentase dokumen kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah.	$\frac{\sum \text{dokumen kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pemma}}{\sum \text{dokumen kajian dan penelitian yang dihasilkan}} \times 100$ <p>Definisi Operasional : untuk mengukur dokumen hasil kajian dan penelitian SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Sidoarjo yang ditindaklanjuti (tahun n-2) dibandingkan jumlah yang dihasil kajian dan penelitian dalam setahun.</p>	Laporan monev bidang litbang dan data	Bidang Litbang dan data

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### c. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam usaha mencapai sasaran strategis jangka menengah sebagaimana diatas dan pencapaian sasaran serta target capaian indikator sasaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran dari rencana strategis jangka menengah yang harus dicapai tiap tahun sesuai dengan misi organisasi. Seperti dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2017**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten**  
**Sidoarjo**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program Utama
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	b. Persentase PD yang menyusun dokumen Renja tahunan dengan kualitas baik	92%	1. Program penyusunan, monev, data perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran 2. Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan sda 3. Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan aparatur 4. Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang kesramas 5. Program sinergitas kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengatasan kemiskinan 6. Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah 7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	c. Persentase usulan Musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	55%	
	d. Persentase program pembangunan perangkat daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	82%	
	e. Persentase kegiatan pembangunan sectoral dalam RKPD terhadap arahan pemanfaatan ruang (RTRW dan RDTRK)	40%	
Sasaran Strategis 2 :	a. Persentase dokumen kajian	60%	1. Program penelitian dan

Meningkatnya fungsi litbang dan data sebagai dasar merumuskan kebijakan pemerintah daerah	dan penelitian yang ditindaklanjuti menjadi perumusan kebijakan pemerintah daerah		pengembangan
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

\*Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian, perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu. Dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang mengacu pada Perubahan Renstra, RKT, dan anggaran yang dikelola berdasarkan Dokumen Anggaran. Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 dengan indikator dan

target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel

perjanjian kinerja sebagai berikut :

**a. Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda**

**Tabel 3.4**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten**  
**Sidoarjo Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang menyusun dokumen Renja Tahunan dengan kualitas baik	92%
		Persentase usulan Musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	55%
		Persentase program pembangunan perangkat daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	82%
		Persentase kegiatan pembangunan sectoral dalam RKPD terhadap arahan pemanfaatan ruang (RTRW dan RDTRK)	40%
2.	Meningkatnya fungsi litbang dan data sebagai dasar merumuskan kebijakan pemertintah daerah	Persentase sokumen kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti menjadi perumusan kebijakan pemerintah daerah	60%

**b. Alokasi Anggaran Per Program/Kegiatan**

Setiap program/kegiatan akan diberikan alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk merealisasikan program yang sudah direncanakan. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk semua rencana kinerja baik rencana jangka menengah maupun rencana tahunan. Anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap program/kegiatan berdasarkan anggaran LAKIP tahun yang lalu. LAKIP tahun lalu akan menjadi rujukan awal dalam

penentuan anggaran dalam setiap program maupun sasaran kinerja.

Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Ibu Suci sebagai salahsatu Tim Penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo setiap tahun. Beliau menjelaskan bahwa selain sebagai pengukuran kinerja, LAKIP juga mempunyai fungsi sebagai acuan anggaran untuk tahun mendatang. di samping itu, dengan adanya LAKIP menurut hemat Beliau jauh lebih memotivasi kinerja tiap pegawai daerah.

### **c. Pengukuran Kinerja**

#### **a. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2017**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dalam tujuan dan realisasinya. Pengukuran ini termasuk dalam hal baru, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran hanya sampai pada tingkat capaian sasaran strategis. Tujuan yang ditetapkan merupakan penjabaran dalam mencapai misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yang telah ditetapkan.



Apabila hasil pengukurannya semakin tinggi realisasi, maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Dan semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mencapai tingkat realisasi tinggi maka diperlukan Indikator kinerja. Hal ini digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis. Penjabaran indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Table 3.5**  
**Pengukuran Indikator Tujuan Tahun 2017**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Ranstra (2021)	Realisasi Tahun 2017	% Capaian 2017 thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas Baik	100		
		Persentase capaian indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	92		
		Persentase program pembangunan dalam RKPD/RPJMD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang (RTRW/RDTRK)	60	59,51	99,18
2.	Mengoptimalkan fungsi litbang dan data sebagai dasar merumuskan kebijakan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi dari hasil kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan pemerintah daerah	80	95	118,75

### b. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja Tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 skala peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Interval Nilai Realisasi Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

### c. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan, diperlukan pengukuran kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi indikator kinerja program dan kegiatan dengan target dari indikator kinerja program dan kegiatan di Tahun 2017. Sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Prosentase PD yang menyusun dokumen Renja tahunan dengan kualitas baik	90	92,91	103,23	861.250.000,00	830.908.511,00	96,48
						1.781.500.000,00	1.479.333.150,00	83,04
						1.405.000.000,00	1.267.373.950,00	90,20
2.		Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	55	64,07	116,86	7.949.025.000,00	7.572.913.793,00	95,27
3.		Prosentase program pembangunan perangkat daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	82	95,83	118,75	246.304.000,00	4.663.624.850,00	88,89
4.		Prosentase kegiatan pembangunan sektoral dalam RKPD terhadap pemanfaatan ruang (RTRW dan RDTRK)	40	59,51	148,77	246.304.000,00	4.663.624.850,00	88,89
5.	Meningkatnya	Prosentase dokumen	60	95	118,75	1.570.725.000,00	1.344.757.584,00	85,61

	fungsi litbang dan data sebagai dasar merumuskan kebijakan pemerintah daerah	kajian dan penelitian yang ditindaklanjuti menjadi perumusan kebijakan pemerintah daerah						
	<b>Belanja Langsung Program Utama</b>					<b>15.928.721.500,00</b>	<b>14.313.351.404,00</b>	<b>89,85</b>

#### d. Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

Tingkat efektifitas kinerja bisa dilihat dari sudah tercapai atau belum suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan tingkat efisiensi kinerja dapat dilihat dari rasio antara *output* dengan *input*. Dalam LAKIP Bappeda Sidoarjo pada tahun 2017 dijelaskan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sudah memenuhi kriteria. Hal ini bisa dilihat dalam hasil LAKIP Bappeda Sidoarjo tahun 2017.

## 2. Data LAKIP tahun 2018

### a. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Bappeda) berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun yaitu :

- 1) Perubahan RPJMD 2016-2021.

- 2) Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.
- 3) Rencana Kinerja Tahun 2018.
- 4) Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2018.

**b. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD**

Bappeda Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang pemerintahan urusan Perencanaan dan telah menetapkan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Dari tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

**c. Perencanaan Strategis**

Dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 seperti yang telah digambarkan dalam matriks di atas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskanlah dalam tujuan, sasaran serta indikator sasaran dan telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diberikan

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan.

Dalam kedudukannya itu, BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo harus dapat berperan sebagai lembaga teknis daerah yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Sidoarjo. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, pada urusan perencanaan pembangunan.

Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain.

#### **d. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 berisikan penugasan dari Bupati Sidoarjo untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Bappeda menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan

wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bappeda pada Tahun 2018 telah membuat Perjanjian Kinerja mulai pejabat eselon II sampai dengan Eselon IV bahkan sampai staf/individu, hal ini merupakan komitmen dari Pimpinan sampai dengan staf dalam mewujudkan budaya kinerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2018 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel perjanjian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	95 %
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	60 %
		Persentase program pembangunan perangkat daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) $\geq 76$ %	85 %
		Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	45 %
2.	Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian data	Prosentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	70 %

**e. Anggaran per program**

Seperti setiap perencanaan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran pun disiapkan untuk merealisasikan program

kerja yang telah disusun pada tahun 2018. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD. Bappeda menyiapkan anggaran untuk tiap kegiatan atau per program guna memudahkan realisasi program yang sudah dicanangkan baik dalam program jangka menengah maupun perencanaan strategis. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan semua program bisa terrealisasi dengan maksimal.

**f. Akuntabilitas Kinerja tahun 2018**

Akuntabilitas kinerja bisa dilakukan dengan membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dengan realisasinya. Perbandingan tersebut dijabarkan dalam capaian-capaian kinerja, baik jangka menengah, kinerja utama maupun program dan kegiatan. Penilaian kinerja ini mengacu pada perjanjian kinerja Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis target yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2016-2021. Berikut tabel yang menunjukkan capaian kinerja jangka menengah dan capaian kinerja sasaran/utama tahun 2018:

**Tabel 3.9**

**Pengukuran Indikator Tujuan Tahun 2018**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (2021)	Target	Realisasi Tahun 2018	% Capaian 2018
1	2	3	4	5	6	7



1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan pembangunan daerah (PPD)	80,5	3,89	3,89	100
----	------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------	------	------	-----

Tabel 3.10

## Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2021) %	Realisasi Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	95	96,3	101,3	100	96,3
		Prosentase usulan Musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	60	60,9	101,5	75	81,2
		Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76 %	85	93,7	110,3	92	101,9
		Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	45	64,5	143,2	60	107,4
2.	Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kinerja dan data	Persentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	70	73	104,3	80	91,3

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan, diperlukan pengukuran kinerja program dan kegiatan Tahun 2018 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja program dan

kegiatan di Tahun 2018, dengan target dari indikator kinerja program dan kegiatan di Tahun 2018, sebagaimana pada Renja Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Pengukuran Kinerja program/kegiatan ini sekaligus juga evaluasi terhadap pejabat eselon III dan IV yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III dan IV.

**g. Akuntabilitas Keuangan**

**a. Realisasi Anggaran**

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018.

Pagu Anggaran Bappeda keseluruhan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 22.371.853.860,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 5.697.065.960,00 atau 25,47 % dari total seluruh anggaran.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 16.674.787.900,00 atau 74,53 % dari total seluruh anggaran.

3. Belanja yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis OPD (non belanja rutin) adalah sebesar Rp. 10.503.441.500,00 atau 46,95 % dari total seluruh anggaran Perangkat Daerah.

Dari total anggaran Bappeda Anggaran Tahun Anggaran 2018 terealisasi **sebesar Rp. 19.857.465.895,00 atau sebesar 88,76 %**. Realisasi ini lebih rendah dari pada realisasi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu **sebesar 90,25 %**. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan antara lain :

1. Penyatuan kegiatan perjalanan dinas dalam satu kegiatan.
2. Pengadaan *software* aplikasi dalam pelayanan surat-menyurat yang direncanakan akan ditangani langsung oleh Diskominfo.
3. Adanya selektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan rapat-rapat di luar kantor
4. Tidak terlaksanakannya acara sosialisasi Perda Perubahan RPJMD dikarenakan Perubahan RPJMD masih dalam pembahasan bersama DPRD.

Rincian realiasi Anggaran Bappeda Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dalam LAKIP tahun 2018.

#### **b. Alokasi Anggaran per Sasaran**

Dari total keseluruhan anggaran, total belanja Langsung Bappeda tahun anggaran 2018 adalah Rp. 16.674.787.900,00

atau 74,53 %. Sedangkan untuk belanja terkait dengan pencapaian sasaran strategis OPD (non belanja rutin) adalah Rp. 10.503.441.500,00 atau 46,95 % dari total anggaran Perangkat Daerah.

**c. Efisiensi dan Efektivitas Kinerja**

Efisiensi dan efektivitas kinerja Bappeda pada tahun 2018 akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran per Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Program	Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Prosentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	95	96,3	101,3	Program perencanaan bidang ekonomi	1.281.025.000,0 0	1.213.214.900,0 0	94,7	
						Program perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	1.930.155.000,0 0	1.716.837.650,0 0	88,9	
		Persentase usulan Musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	60	60,9	101,5	Program perencanaan pembangunan daerah	2.344.206.000,0 0	1.889.960.060,0 0	80,6	
		Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76 %	85	93,7	110,2					
		Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	45	64,45	143,2	Program perencanaan bidang pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah	3.884.365.500,0 0	3.854.869.000,0 0	99,2	
2.	Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian dan data	Persentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	70	73	104,3	Program penelitian, pengembangan dan penyusunan data pembangunan daerah	1.063.690.000,0 0	986.389.000,00	92,7	
<b>BELANJA LANGSUNG PER SASARAN</b>						<b>10.503.441.500,00</b>	<b>9.661.270.610,00</b>	<b>91,98</b>		

### a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi kinerja akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12**

#### **Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya T.A 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	101,3	91,8	9,5
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	101,5	99,2	2,3
	Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76 %	110,2	74,8	35,4
	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	143,2	99,2	44
Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian dan data	Persentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	104,3	92,7	11,6

Efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran (capaian kinerja  $\geq$  100 %)

**Tabel 3.13**  
**Laporan Pencapaian Kinerja Program Bappeda Sidoarjo**  
**Tahun 2017 dan Tahun 2018**

No.	Program	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Rencana capaian (target/Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana capaian (target/Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.286.237.000	2.080.135.506	90,99	4.309.986.400	3.414.156.211	79,22
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	745.900.000	703.893.790	94,37	1.706.680.000	1.643.411.990	96,29
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	732.987.750	656.928.369	89,62	71.000.000	12.090.000	17,03
4.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan sumber daya aparatur	887.600.000	800.985.966	90,26	-	-	-
5.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang kesramas	865.904.500	821.802.950	94,91	-	-	-
6.	Sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan	456.783.000	367.017.650	80,35	-	-	-
7.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan aparatur	412.267.000	343.997.261	83,44	-	-	-
8.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah	6.374.435.000	6.024.392.042	94,51	3.884.365.500	3.854.869.000	99,24
9.	Penyusunan, monev dan	2.397.215.250	1.865.471.210	77,82	-	-	-

	perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran						
10.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	65.500.000	0	0	66.850.000	57.925.000	86,65
11.	Penelitian dan pengembangan	703.892.000	648.726.600	92,16	1.063.690.000	986.389.000	92,73
12.	Perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	2.344.206.000	1.889.960.060	80,62
13.	Perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	-	-	-	1.930.155.000	1.716.837.650	88,95
14.	Peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	16.830.000	15.840.000	94,12
15.	Perencanaan bidang ekonomi	-	-	-	1.281.025.000	1.213.214.900	94,71
	<b>Jumlah</b>	<b>15.149.411.500</b>	<b>13.664.624.804</b>	<b>90,19</b>	<b>16.674.787.900</b>	<b>14.804.693.811</b>	<b>88,78</b>

(Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2018)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Analisis Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tingkat ekonomi, efisien, dan efektifitas LAKIP berdasarkan metode *Value for Money* (VFM). Berdasarkan data yang terdapat pada LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 didapat data-data terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan maupun direalisasikan. Secara keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Bappeda sudah merealisasikan perencanaan strategis baik rencana kinerja jangka menengah maupun kinerja tahunan dengan baik.

Dalam laporan tersebut dipaparkan perbandingan capaian kinerja Bappeda saat ini dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat paparan tentang perbandingan antara capaian perjanjian kinerja tahun 2017 dengan perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Mengacu pada LAKIP bisa disimpulkan bahwa kinerja Bappeda tahun 2017 pada program-program yang direncanakan maupun direalisasikan sudah baik. Untuk tahun 2018, kinerja Bappeda pada program-program yang direncanakan maupun direalisasikan pun sudah baik kecuali pada realisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Namun ada beberapa program yang dirampingkan pada tahun 2018. Berikut ini tabel pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2017-2018 secara keseluruhan, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Laporan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 - 2018**

No	Program	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Program Bappeda Sidoarjo	121,27	89,85	112,1	91,9

(Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Sidoarjo)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah capaian kinerja tahun 2017 sebesar 121,27 % yang dikategorikan sangat baik dan jumlah rata-rata anggarannya sebesar 89,85%. Sedangkan, pada tahun 2018 jumlah rata-rata kinerjanya sebesar 112,1 % yang dikategorikan sangat baik dan jumlah rata-rata anggarannya sebesar 91,9 %. Artinya dengan realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan anggaran, maka terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran.

## B. Analisis *Value for Money* (VFM) Terhadap Kinerja Keuangan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

*Value for money* (VFM) merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari data LAKIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan tahun 2018 yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan pejabat yang berwenang, peneliti akan melakukan perhitungan secara matematis berdasarkan rumus yang tertera dalam bab II skripsi ini. Berikut ini analisis *Value for money* (VFM) yang peneliti lakukan menggunakan tiga pengukuran:

### 1. Ekonomi

Dalam mengukur ekonomi dibutuhkan data-data anggaran target dan realisasinya. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah. Penghitungan ekonomi ini menggunakan rumus berikut :

$$Ekonomi = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

< 100% : ekonomis

= 100 % : ekonomis berimbang

> 100 % : tidak ekonomis

Sebagai contoh perhitungan ekonomi pada capaian program sasaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{14.313.351.404}{15.928.721.500} \times 100\% \\ &= 89,85 \% \end{aligned}$$

Keterangan :

Input : Realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar Rp. 14.313.351.404,-

Nilai input : Pagu anggaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar Rp. 15.928.721.500,-

Hasil perhitungan ekonomi pada program Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 sebesar 89,85 %, kinerja untuk program tersebut dikategorikan ekonomis. Analisis perhitungan ekonomis untuk seluruh program Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2018, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Perhitungan Ekonomi Program Bappeda Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2017 dan Tahun 2018**

No.	Program	Tahun	PAPBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomi (%)	Ket.
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	2017	2.286.237.000,00	2.080.135.566,00	90,99	Ekonomis
		2018	4.309.986.400,00	3.414.156.211,00	79,22	Ekonomis

2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2017	745.900.000,00	703.893.790,00	94,37	Ekonomis
		2018	1.706.680.000,00	1.643.411.990,00	96,29	Ekonomis
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2017	732.987.750,00	656.928.369,00	89,62	Ekonomis
		2018	71.000.000,00	12.090.000,00	17,03	Ekonomis
4.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	2017	887.600.000,00	800.985.966,00	90,24	Ekonomis
5.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang Kesramas	2017	865.904.500,00	821.802.950,00	94,91	Ekonomis
		2018	1.930.155.000,00	1.716.837.650,00	88,95	Ekonomis
6.	Sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan	2017	456.783.000,00	367.017.650,00	80,35	Ekonomis
7.	Koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi bidang pemerintahan dan aparatur	2017	412.267.000,00	343.997.261,00	83,44	Ekonomis
8.	Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana	2017	6.374.435.000,00	6.024.392.042,00	94,51	Ekonomis
		2018	3.884.365.500,00	3.854.869.000,00	99,24	Ekonomis

	wilayah					
9.	Penyusunan, monev, data perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran	2017	2.397.215.250,00	1.865.471.210,00	77,82	Ekonomis
		2018	2.344.206.000,00	1.889.960.060,00	80,62	Ekonomis
10.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	2017	65.500.000,00	0	0	Ekonomis
		2018	66.850.000,00	57.925.000,00	86,65	Ekonomis
11.	Penelitian dan pengembangan	2017	703.892.000,00	648.726.600,00	92,16	Ekonomis
		2018	1.063.690.000,00	986.389.000,00	92,73	Ekonomis
12.	Perencanaan bidang ekonomi	2018	1.281.025.000,00	1.213.214.900,00	94,71	Ekonomis

(Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2017-2018)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan program kinerja yang ada di Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 dan tahun 2018 sudah memenuhi kriteria secara ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil perhitungannya secara keseluruhan pada program tersebut diatas adalah kurang dari 100%.

## 2. Efisiensi

Pengukuran efisiensi menggunakan rasio *output* dengan *input*. Artinya, jika semakin besar *output* dibandingkan *input* maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Dengan kategori :

< 100% : efisien

= 100 % : efisien berimbang

> 100 % : tidak efisien

Sebagai contoh pada program perencanaan bidang ekonomi tahun 2018 :

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{94,7\%}{101,3\%} \times 100\% \\ &= 93,48\% \end{aligned}$$

Keterangan :

*Output* : Persentase capaian anggaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada program perencanaan bidang ekonomi tahun 2018 sebesar 94,7 %

*Input* : Persentase capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada program perencanaan bidang ekonomi tahun 2018 sebesar 101,3 %

Dari contoh perhitungan di atas, didapatkan hasil angka sebesar 93,48 % yang menunjukkan bahwa program bidang ekonomi Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 tersebut dikategorikan efisien. Analisis pengukuran efisien pada program-program Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3**

**Pengukuran Efisiensi Program Bappeda Sidoarjo**

### Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator kinerja	Tahun	Capaian output (%)	Capaian input (%)	Efisiensi	Ket.
Prosentase PD yang menyusun dokumen Renja PD dengan kualitas baik	2017	89,91	103,23	87,09	Efisien
	2018	94,7	101,3	93,48	Efisien
Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	2017	96,93	101,47	84,50	Efisien
	2018	80,6	101,5	79,40	Efisien
Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTRW	2017	95,27	100	95,27	Efisien
	2018	99,2	143,2	69,27	Efisien
Prosentase capaian sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75 %	2017	88,89	100	88,89	Efisien
	2018	80,6	101,5	79,40	Efisien
Prosentase dokumen kajian penelitian yang ditindaklanjuti sebagai rumusan kebijakan pembangunan daerah	2017	85,61	125	68,48	Efisien
	2018	92,7	104,3	88,87	Efisien

(Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo)

Dari hasil perhitungan dalam tabel dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2018 pada indikator sasaran dinyatakan sudah efisien. Sebab, hasil perhitungan pada sasaran program diatas menunjukkan kurang dari 100% yang dikategorikan sebagai efisien.



### 3. Efektivitas

Efektivitas dapat diukur melalui rasio antara *output* dengan *outcome*. Artinya, semakin besar *output* dibandingkan *outcome*, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Berikut rumusan yang peneliti gunakan untuk melakukan perhitungan efektivitas :

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

> 100%	: Efektif
= 100 %	: Efektifitas berimbang
< 100 %	: Tidak efektif

Sebagai contoh, perhitungan efektivitas terhadap program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 :

$$Efektivitas = \frac{92,91\%}{90\%} \times 100\% = 103,23\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Persentase realisasi kinerja program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 92,91 %.

*Output* : Persentase target kinerja program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 90 %.

Hasil perhitungan pada program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 menunjukkan angka 103,23 % yang dikategorikan efisien. Analisis pengukuran efektivitas pada program kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2018 bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Pengukuran Efektivitas Program Bappeda Sidoarjo 2017-2018**

Program kinerja Bappeda Kab. Sidoarjo	Tahun	Kinerja (%)		Efektivitas	Ket.
		Target	Realisasi		
Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur	2017	90	92,91	103,23	Efektif
Program perencanaan pembangunan ekonomi	2017	90	92,91	103,23	Efektif
	2018	95	96,3	101,3	Efektif
Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang Kesramas	2017	90	92,91	103,23	Efektif
	2018	95	96,3	101,3	Efektif
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2017	85	86,25	101,47	Efektif
Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana	2017	75	75	100	Efektif berimbang
	2018	45	64,45	143,2	Efektif

wilayah					
Penyusunan, monev, data perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran	2017	80	80	100	Efektif berimbang
	2018	85	93,7	110,2	Efektif
Penelitian dan pengembangan dan penyusunan data pembangunan daerah	2017	80	100	125	Efektif
	2018	70	73	104,3	Efektif

(sumber : Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 program yaitu program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah dan program penyusunan, *monev*, data perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran pada tahun 2017 yang dikategorikan efektif berimbang sebab hasilnya sama dengan 100%. Kemudian untuk keseluruhan program Bappeda Kabupaten Sidoarjo baik pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan rumus yang digunakan peneliti dikategorikan efektif dikarenakan hasil perhitungan nilai efektivitas lebih dari 100%.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul analisis *Value for money* pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sangat baik. Begitu pula dengan tahun 2018 pun dikategorikan sangat baik. Selain itu, dalam penggunaan anggaran dari tahun 2017 dan 2018 dinyatakan efisien karena capaian kerjanya lebih besar daripada dengan capaian anggaran.
2. Berdasarkan analisis *value for money* dengan menggunakan rumus yang tersedia didapat hasil yang sesuai kriteria pada keseluruhan program kinerja/sasaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan tahun 2018 yakni dikategorikan ekonomi, efisien dan efektif. Penjabaran tentang hasil perhitungan dijelaskan melalui tabel. Akan tetapi pada tingkat efektivitas, terdapat 2 program yaitu program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah dan program penyusunan, money, data perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran yang mempunyai tingkat efektivitas berimbang disebabkan hasil perhitungan sama dengan 100%.

## **B. Saran**

Bagi Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sidoarjo sudah cukup bagus dalam pengelolaan keuangan. Harapan kami kinerja tiap program harus lebih ditingkatkan agar realisasi jauh lebih tinggi daripada capaian anggaran ataupun target kinerja.

Bagi peneliti, diharapkan selanjutnya mampu meneliti kinerja keuangan dengan menggunakan data yang lebih banyak agar hasil penelitian mendekati kebenaran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- “Bupati Evaluasi Kinerja OPD dan Camat,” *Kamis, 22 Maret 2018*, diakses Oktober 30, 2019, <https://bappeda.sidoarjo.go.id/berita/detail/bupati-evaluasi-kinerja-opd-dan-camat>.
- Meri, Afsita. dkk., *“Analisis Value For Money dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada PDAM Tirta Musi Palembang (Universitas STIE MDP, 2017).*
- Purnomo, Agus. dkk., *“Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan (Universitas Udayana, Bali 2015).*
- Sumenge, Ariel Sharon, *“Analisis Efektif dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan (Universitas Sam Ratulangi, Manado 2013).*
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).*
- Narbuko, Chalid. dkk. *metodologi penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).*
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011).*
- Perwirasari, Fajar Bayu Putri, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Universitas Negeri Semarang, Semarang 2016).*
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi (Surabaya, Cet XII, 2017).*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, “Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi” (Surat Edaran Nomor: In. 02/1/PP.00.9/ .../IX/2014, 2014).

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Segara, Lalu Danny. “*Analisis Determinan Good Government Governance Serta Implikasi pada Kualitas LAKIP*” (Universitas Mataram, Mataram 2017).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sidoarjo tahun 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sidoarjo tahun 2018

Indriaswari, Laurensia Koen. “*Analisi Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas* (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017).

Tresnowati, Mega. dkk. “*Analisis Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung*”(Universitas Ibn Khaldun, Bogor).

Meyliana. dkk. “*Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung* (Universitas Kristen Maranatha, 2017).

Wulansuci, Saras. “*Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010*” (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2017)

Yanti, Sri Dewi, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi" (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015).

Santoso, Susan. "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013).

Widiyastuti, Titik. "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali (Universitas Muhammdiyah, Surakarta 2018).

Undang-undang Nomor 7 tahun 1999, Instruksi Presiden Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 tahun 1999.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A